

BAB I

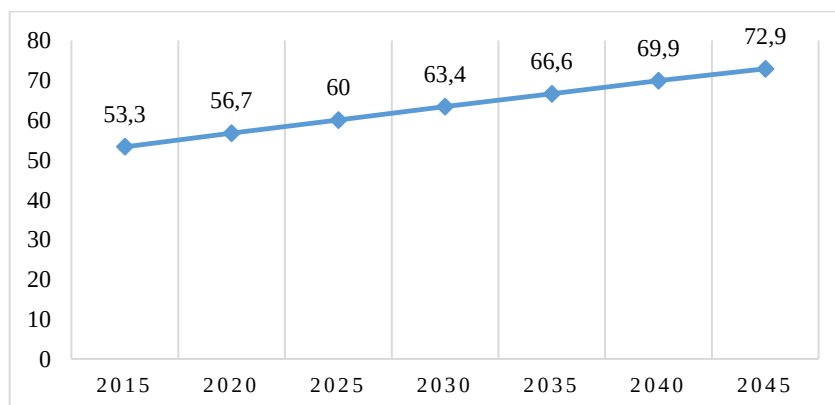
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urbanisasi merupakan fenomena yang dialami oleh berbagai wilayah khususnya kota – kota besar di Indonesia. Urbanisasi terjadi dikarenakan belum meratanya pertumbuhan wilayah terutama antara daerah pedalaman dengan daerah perkotaan. Semakin besar perbedaan tingkat pertumbuhan wilayah, maka akan semakin tinggi pula tingkat urbanisasi di wilayah tersebut.

Sebagai salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia, urbanisasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1920, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan hanya sekitar 5,8 persen dari seluruh penduduk yang ada (Soegijoko dan Bulkin, 1994). Pada tahun 2015, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 53,3 persen.

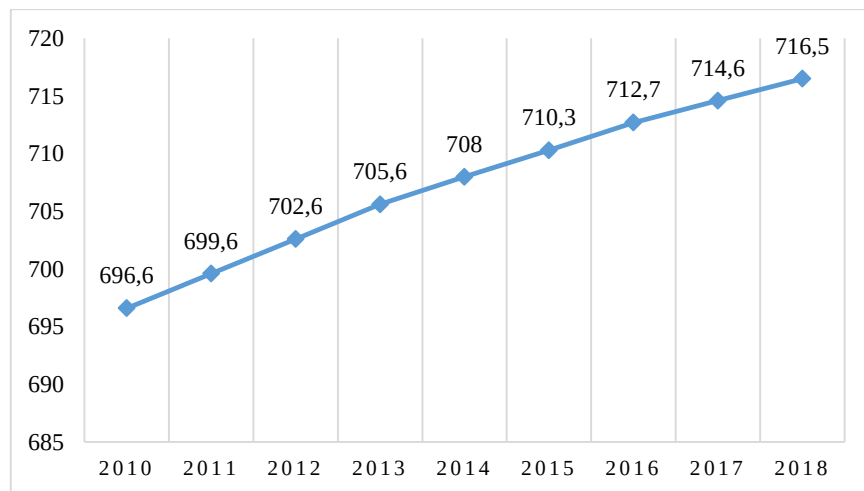
Proyeksi yang dilakukan sampai dengan tahun 2045 memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun tersebut akan mencapai angka 72,9 persen (Gambar 1.1).



Gambar 1. 1 Diagram Proyeksi Presentase Penduduk Daerah Perkotaan

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015 – 2045 hasil SUPAS 2015

Selaras dengan peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan, Kabupaten Purworejo juga mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Selama kurun waktu 8 tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan sebanyak 19,9 ribu jiwa. Data mengenai peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 1. 2 Diagram Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo 2010 – 2018 (ribu jiwa)

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Purworejo tahun 2019

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara terus menerus akan menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas yang disebabkan oleh kemiskinan, angka pengangguran yang tinggi, dan terbatasnya jumlah lahan di perkotaan.

Terbatasnya jumlah lahan akan membuat harga jual tanah meningkat, sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun. Penduduk yang tidak mampu untuk membeli lahan yang cukup untuk tempat tinggal akhirnya akan melakukan pemadatan dalam membangun rumah. Karena pemadatan tersebut, jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya hampir tidak ada ruang/sela. Hal ini membuat kondisi lingkungan sekitar menjadi kumuh dan tidak tertata. Daerah yang menjadi permukiman kumuh sebagian besar dibentuk dan dihuni oleh masyarakat kelas

ekonomi rendah akibat ketidakmampuan mereka untuk bermukim secara layak (Rindarjono, 2012).

Permasalahan yang sering terjadi di kawasan kumuh antara lain kurang tersedianya air bersih, buruknya sanitasi dan persampahan hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Permasalahan lain yang ditimbulkan yaitu banjir dikarenakan kondisi saluran drainase yang buruk serta apabila terjadi kebakaran akan menimbulkan kerugian yang besar dikarenakan rapatnya jarak antar bangunan dan jaringan jalan yang kurang memadai.

Menurut Everett S Lee (Mantra, 2000) faktor yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi adalah adanya kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi di daerah di mana mereka tinggal atau merugikan apabila tinggal di tempat tersebut sehingga seseorang merasa perlu untuk pindah ke tempat lain. Namun, pada kenyataannya penduduk di kawasan kumuh memilih untuk tinggal dan bertahan di kawasan kumuh tersebut atau dengan kata lain mereka tidak melakukan migrasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dalam pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Sejak tahun 1999 hingga sekarang Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa program untuk menanggulangi kemiskinan. Program tersebut antara lain adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) dan tahun 2016 pemerintah meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berfokus pada peningkatan kualitas permukiman untuk mendukung pencapaian target dari 4 Kementerian PUPR yaitu universal access 100-0-100 (100% air minum layak, 0% kumuh, 100% sanitasi layak) pada tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Purworejo mengimplementasikan program KOTAKU yang merupakan program nasional yang berplatform kolaborasi berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh guna mendukung pencapaian target Kementerian PUPR yaitu 0% kumuh pada tahun 2019. Program KOTAKU di Kabupaten Purworejo baru mencapai tahap perencanaan yang mencakup proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan (Nawawi, H. 2003:29). Program ini sendiri dibuat untuk mengatasi munculnya pemukiman kumuh yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mengetahui lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo dapat dilihat ada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. 1 Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Kecamatan Purworejo		
	a. Kelurahan Pangenrejo	9,17	Kumuh Sedang
	b. Kelurahan Mranti	4,39	Kumuh Sedang
	c. Kelurahan Baledono	18,41	Kumuh Berat
	d. Kelurahan Purworejo	14,06	Kumuh Berat
	e. Kelurahan Keseneng	2,80	Kumuh Sedang
	f. Kelurahan Pangenjurutengah	39,30	Kumuh Sedang
2	Kecamatan Kutoarjo		
	a. Kelurahan Kutoarjo	56,59	Kumuh Berat
	b. Kelurahan Bandung	24,14	Kumuh Sedang
	c. Kelurahan Semawung	11,92	Kumuh Sedang
	Daleman	9,23	Kumuh Sedang
	d. Kelurahan Bayem	7,40	Kumuh Sedang
	e. Kelurahan Katerban		
	TOTAL	197,41	

Sumber: Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/570/2014 tentang Penetapan

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini difokuskan pada kawasan kumuh Kelurahan Kutoarjo dikarenakan Kelurahan Kutoarjo merupakan kelurahan dengan tingkat kekumuhan tererat dan terluas di Kabupaten Purworejo. Kelurahan Kutoarjo mempunyai luas 237,84 Ha (Kecamatan Kutoarjo dalam Angka, 2019) dengan

penggunaan tanah untuk pemukiman kumuh kurang lebih 56,59 Ha. Jumlah penduduk miskin di Kelurahan Kutoarjo mencapai 5.400 jiwa dari total keseluruhan 12.356 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga miskin sebanyak 1.637, sedangkan RW yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo adalah RW II, RW III, RW V, RW IX, dan RW XI.

Tabel 1. 2 Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Kutoarjo

No	Lokasi Sebaran Kumuh	Luas (Ha)	Kepala Keluarga
1	RW 02	12, 16	266
2	RW 03	16, 58	178
3	RW 05	37, 06	614
4	RW 09	16, 98	373
5	RW 11	17, 18	206
Jumlah			1637

Sumber: Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/570/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo

Beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kutoarjo khususnya Kelurahan Kutoarjo adalah banjir, kepadatan bangunan tinggi dan ketidakteraturan bangunan, tingginya jumlah RTLH, tidak optimalnya fungsi drainase, akses jalan antar desa atau antar kelurahan yang masih berupa tanah, sanitasi resiko tinggi, dan masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat (RP2KPKP Kab. Purworejo, 2017).



Gambar 1. 3 Potret Permukiman Kumuh di Kelurahan Kutoarjo
Sumber : Survey Lapangan, 2020

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian guna menganalisis karakteristik penduduk kawasan kumuh Kabupaten Purworejo, khususnya di Kecamatan Kutoarjo, serta faktor yang mempengaruhi imobilitas penduduk kawasan kumuh yang menyebabkan mereka enggan untuk berpindah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik penduduk permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi imobilitas penduduk permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik penduduk permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo
2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi imobilitas penduduk permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini secara ilmiah dan secara praktis yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan keilmuan bidang geografi khususnya tentang kajian permukiman kumuh.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk lebih memperhatikan masalah permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Urbanisasi

Menurut Kamus Tata Ruang (1997:112) urbanisasi adalah perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan perdesaan menjadi dominan perkotaan; dalam arti terbatas juga disebut penambahan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari wilayah perdesaan sekitarnya atau karena perpindahan penduduk dari kota lain.

King dan Colledge (1978) mengemukakan bahwa setidaknya ada empat proses utama keruangan itu yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengenal konsep urbanisasi diantaranya : Pertama, adanya pemusatan kekuasaan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan dan sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan hubungan kota dengan daerah sekitarnya. Kedua, terdapatnya arus modal dan investasi yang berfungsi untuk mengatur kesejahteraan penduduk kota dan wilayah sekitarnya. Ketiga, terdapatnya proses difusi inovasi serta perubahan yang berdampak pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik di perkotaan. Akhirnya, rupanya factor migrasi dan pemukiman baru dapat terjadi apabila pengaruh kota secara terus menerus masuk ke daerah pedesaan. Sedangkan menurut Schnore (1964) yang mana baginya masalah urbanisasi dihubungkan dengan proses terbentuknya kota dan konsep tentang urbanisme relevan dengan perilaku serta gaya hidup warga kota.

1.5.1.2 Dampak Urbanisasi

Bintarto (1983) mengemukakan sebab – sebab adanya urbanisasi di berbagai negara agak berbeda. Akan tetapi secara umum ialah karena adanya ketimpangan keruangan, termasuk didalamnya ketimpangan penduduk dan ekonomi. Meskipun demikian, adanya urbanisasi dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif yaitu sebagai berikut.

1. Struktur ekonomi menjadi lebih bervariasi. Timbul bermacam – macam usaha, antara lain, transportasi, perdagangan, bermacam – macam usaha di bidang jasa, dan lain – lain
2. Berkembangnya usaha di bidang wiraswasta, seperti peternakan ayam, burung puyuh, kerajinan tangan, pariwisata, dan lain – lain
3. Berkembangnya bidang pendidikan mulai SD sampai akademi/perguruan tinggi
4. Meluasnya kota ke arah pinggiran kota sehingga transportasi menjadi lebih lancar
5. Meningkatnya harga tanah, baik di kota maupun pinggiran kota, dan
6. Berkembangnya industrialisasi sebab tenaga kerja murah, pasaran meluas sehingga industry cenderung lebih berkembang.

Ischak (2001) mengemukakan urbanisasi menyebabkan pertambahan penduduk kota semakin cepat, yang pada gilirannya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam dampak negatif terhadap lingkungan antara lain.

1. Berkurangnya Ruang Terbuka
Makin bertambahnya penduduk di daerah kota akan menyebabkan bertambahnya bangunan sehingga mengurangi daerah terbuka atau daerah kosong. Pada setiap jengkal tanah selalu terisi oleh bangunan perumahan. Bahkan, daerah jalur hijau atau bantara sungai kadang sudah terisi oleh bangunan – bangunan liar yang bersifat permanen atau semipermanen.
2. Masalah Pencemaran Air
Tingginya pencemaran air adalah akibat makin banyaknya limbah industri dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Di pihak lain, semakin banyak industri dan rumah tangga yang mengambil air tanah di daerah kota di pantai, hal ini akan menyebabkan terjadinya intrusi air laut ke darat
3. Masalah Transportasi dan Pencemaran Udara
Transportasi yang lancar merupakan salah satu daya Tarik bagi urbanisasi. Makin lancarnya hubungan antara desa dan kota akan memperbesar arus urbanisasi. Dampaknya ialah akan meningkatnya jumlah kendaraan yang

beroperasi di kota – kota besar. Hal itu akan menyebabkan kurang lancarnya arus lalu lintas di kota – kota besar dan juga pencemaran udara akibat padatnya lalu lintas di perkotaan.

4. Pencemaran Udara Akibat Usaha Industri

Selain akibat meningkatnya kendaraan, pencemaran udara juga dapat terjadi karena emisi gas buang yang dihasilkan oleh industri. Oleh karena itu pemilik industri yang emisinya melampaui batas ambang yang telah ditentukan agar menyediakan alat penyaring emisi yang dikeluarkan.

5. Masalah Sampah

Di kota – kota besar, masalah sampah dan pengelolaannya merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Adanya peristiwa urbanisasi yang berlangsung terus menerus dan sifat masyarakat yang konsumtif menambah semakin banyak dan kompleksnya sampah di kota – kota besar.

6. Menurunnya Kebersihan dan Kesehatan (Sanitasi) Lingkungan

Sanitasi lingkungan dapat mengalami penurunan apabila terjadi pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Di samping itu, semakin padatnya penduduk akan menyebabkan makin padatnya permukiman. Hal itu menyebabkan jarak jamban keluarga dan bak resapan sukar dikontrol dan menyebabkan kualitas air sumur menurun apabila jarak antara sumur dan bak resapan terlalu dekat (kurang dari 10 meter).

7. Pencemaran Daerah Pantai

Daerah Pantai yang merupakan muara sungai biasanya kotor, banyak sampah, dan banyak barang lain yang dibuang oleh penduduk ke sungai. Jika sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, air sungai dan pantai akan tercemar

8. Masalah Pendidikan Lingkungan

Kelestarian lingkungan di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Tingkat kesadaran penduduk pada umumnya, dalam menjaga kelestarian lingkungan masih rendah. Tidak hanya mereka yang berpendidikan rendah, para pengusaha industri yang umumnya berpendidikan tinggipun masih perlu dibina.

1.5.1.3 Permukiman Kumuh

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu - satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No.1 tahun 2011).

Adapun menurut Ditjen Bangda Kemendagri, karakteristik permukiman kumuh antara lain : sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan; sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal; lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki: kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km², kepadatan bangunan > 110 bangunan/Ha, kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan), kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun $< 20\%$ dari luas persampahan, kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal, permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan serta kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya.

1.5.1.4 Permukiman Kumuh di Kampung Kota

Kampung kota dapat dijelaskan sebagai sebuah perumahan atau permukiman yang seperti kampung di pedesaan, tapi berada di perkotaan (Setiawan, 2010). Jika dilihat secara fisik sebagian kampung kota biasanya identik dengan ketidakteraturan hingga kondisi kumuh. Namun demikian kampung kota juga biasanya memiliki ciri khas tertentu berdasar sejarahnya masing-masing.

Constantinos A. Doxiadis (1968: 21-35) menyatakan terdapat lima elemen dasar pemukiman yaitu alam (*nature*) adalah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun tempat tinggal maupun fungsi lainnya, manusia (*man*) yaitu baik pribadi maupun kelompok yang membangun atau bertempat tinggal, masyarakat (*society*) yaitu dimana didalamnya terdapat interaksi dan hubungan sosial antar manusia sehingga membentuk ikatan tertentu sebagai masyarakat, rumah (*shells*) yakni bangunan tempat tinggal manusia dengan fungsi masing-masing, jaringan (*networks*) yaitu dengan kata lain sarana prasarana yang mendukung fungsi lingkungan baik alami maupun buatan manusia.

Nursyahbani dan Pigawati (2015) menyatakan identifikasi karakteristik pemukiman kumuh di kampung kota dapat dilakukan dengan melihat karakteristik penghuni, karakteristik hunian, karakteristik sarana prasarana dan karakteristik lingkungan sebagai berikut :

1. Karakteristik Penghuni

Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penghuni, di kampung kota diantaranya, kondisi sosial yaitu identifikasi tingkat pendidikan masyarakat maupun jenis pekerjaan mereka yang akan mempengaruhi kondisi lingkungan serta kondisi bangunan yang mereka huni. Selain itu dilihat pula kepadatan penduduk, serta jumlah penghuni yang tinggal dikawasan pemukiman tersebut yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Kondisi ekonomi yaitu untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari serta dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah dan lingkungan mereka dengan melihat data tingkat pendapatan mereka dan jenis pekerjaan masyarakat

2. Karakteristik Hunian

Mengidentifikasi karakteristik hunian dikampung kota, diantaranya, fungsi dan kegiatan dengan cara melihat aktifitas dan kegiatan yang terjadi di dalam hunian yang terdapat di kawasan permukiman. Selain itu juga akan diidentifikasi penyimpangan - penyimpangan yang terjadi, tampilan bangunan dengan mengidentifikasi tentang tampilan visual bangunan hunian di kawasan

permukiman kampung kota dengan melihat bentuk maupun bahan bangunan ataupun luasan bangunan dibandingkan dengan jumlah penghuninya. Kepemilikan hunian yakni yang terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kepedulian terhadap keadaan perawatan bangunan dan berhubungan erat dengan tampilan bangunan.

3. Karakteristik Sarana dan Prasarana

Identifikasi dan analisis karakteristik sarana dan prasarana penunjang di kampung kota ini untuk bertujuan untuk mengetahui kondisi, ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dalam kawasan permukiman kampung kota. Secara umum ketersediaan dan kebutuhan pada kawasan permukiman dapat dilihat dari kondisi dan manajemen pelayanannya. Semakin buruk kondisi dan rendah tingkat pelayanannya maka akan berpengaruh pula pada tingkat kekumuhannya.

4. Karakteristik Lingkungan

Mengidentifikasi karakteristik lingkungan di kampung kota dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan permukiman kampung kota baik aktifitas yang terjadi di dalam lingkungan permukiman itu sendiri maupun aktifitas yang terdapat di sekitar kawasan yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan permukiman.

1.5.1.5 Immobilitas Penduduk

King (2012b) menyebutkan bahwa perpektif tentang migrasi memiliki dua sisi koin logam, yaitu sisi migrasi dan immobilitas. Sisi migrasi menekankan peran mendasar migrasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sedangkan sisi satunya, sisi immobilitas, memberikan perpektif yang berbeda yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di dunia tidak melakukan migrasi. Data menunjukkan bahwa 214 juta migran internasional di dunia ini hanya mewakili tidak lebih dari 3% dari populasi global. Dengan kata lain, 97% dari populasi dunia tidak melakukan migrasi.

Hal ini oleh Malmerh (1997 dalam King, 2012b) disebut sebagai paradox immobilitas. Paradoks Immobilitas memfokuskan perhatian pada sebagian besar

orang yang tidak bermigrasi meskipun dari pandangan teori – teori migrasi seperti model ekonomi, model *push – pull*, dan model perbedaan upah, memprediksi bahwa mereka seharusnya melakukan migrasi. Oleh karena itu, King (2012b) menyebutkan bahwa salah satu tantangan masa depan untuk teorisasi migrasi adalah pentingnya penjelasan tentang mengapa orang tidak melakukan migrasi.

1.5.1.6 Faktor Immobilitas Penduduk

Amin, Choirul (2018) dalam penelitiannya yang berjudul immobilitas penduduk terdampak rob di pesisir Semarang mengemukakan faktor penahan mobilitas penduduk dapat berupa ikatan lokasi, ikatan keluarga, ikatan sosial, dan ikatan pekerjaan.

1. Ikatan Lokasi

Ikatan lokasi dapat timbul karena tempat tersebut merupakan tanah tumpah darah tempat mereka dilahirkan. Lama tinggal di suatu lokasi juga dapat menumbuhkan ikatan terhadap lokasi. Semakin lama tinggal di suatu lokasi maka seseorang semakin mengenal lokasi tersebut.

Ikatan lokasi merupakan faktor penahan yang memperhatikan adanya interaksi antara lokasi tempat tinggal dengan karakteristik individu yang tinggal. Oleh karena itu, kuat lemahnya ikatan lokasi ini dalam menahan seseorang untuk tetap tinggal sangat tergantung bagaimana interaksi yang terbangun antara individu dengan lokasi tempat tinggalnya.

2. Ikatan Keluarga

Ikatan emosional antara anggota keluarga menunjukkan seberapa dekat satu sama lain antara anggota keluarga. Ikatan keluarga tersebut mencerminkan rasa keterhubungan antara anggota keluarga. Ikatan keluarga tidak hanya sebatas keluarga inti (ayah, ibu, anak) tetapi merupakan ikatan keluarga besar yang memiliki kakek yang sama dimana jumlah anggota keluarganya bisa mencapai puluhan orang. Hal yang istimewa adalah bahwa keluarga besar tersebut tinggal di satu kampung sehingga menumbuhkan ikatan keluarga yang menahan mereka untuk tetap tinggal di kampung tersebut.

Kekerabatan di dalam satu lokasi tempat tinggal yang tidak berjauhan menumbuhkan ikatan keluarga yang kuat sehingga menjadi penahan untuk tetap tinggal di tempat tersebut.

3. Ikatan Sosial

Ikatan sosial terbangun melalui interaksi yang intensif dan harmonis antar warga kampung. Seiring berjalannya waktu, ikatan sosial tersebut menjadi semakin kuat dan berharga sehingga seseorang tidak rela untuk melepaskannya. Ikatan sosial yang kuat menimbulkan keengganan penduduk untuk pindah ke tempat lain.

4. Ikatan Pekerjaan

Tempat kerja yang dekat dan mudah diakses oleh penduduk membuat mereka menilai sangat tinggi terhadap kondisi kampung mereka. Selain karena kedekatan jarak tempat kerja, kemudahan mendapatkan pekerjaan juga menjadi pengikat penduduk sehingga memutuskan untuk tetap tinggal di kampung tersebut.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Prasetyo (2008) melakukan penelitian yang berjudul Kajian Permukiman Kumuh di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta. Penelitian bertujuan untuk Mengetahui karakteristik permukiman kumuh dan pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tumbuhnya permukiman kumuh di kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan mengumpulkan data dari jumlah sample responden dengan parameter karakteristik permukiman berupa sarana jalan dan transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sanitasi dan kebersihan, kondisi fisik bangunan, kepadatan bangunan dan parameter pengaruh social berupa umur, pendidikan, pendapatan, mata pencaharian, dan tanggungan keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor social ekonomi yang berpengaruh terhadap timbulnya permukiman kumuh di kampung Krajan adalah pendidikan, pendapatan, mata pencaharian dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan faktor umur tidak berpengaruh terhadap

timbulnya permukiman kumuh. Persamaan dengan penelitian ini yaitu metode pengambilan data yang digunakan sedangkan perbedaannya yaitu lokasinya berbeda serta penentuan parameter yang berbeda.

Auliannisa (2009) melakukan penelitian yang berjudul Permukiman Kumuh di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pola persebaran permukiman kumuh yang terdapat di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi Quickbird dan survey lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis tetangga terdekat. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, kondisi rumah, kondisi tata letak rumah dan kondisi prasarana dan sarana lingkungan yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, dan drainase. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Pola persebaran permukiman kumuh di Kota Bandung terbagi menjadi pola mengelompok (*Cluster pattern*), pola acak (*random pattern*), dan pola tersebar (*scatter pattern*) dengan pola persebaran yang mendominasi adalah pola acak (*random pattern*). Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji pola persebaran permukiman kumuh dan menganalisis permukiman kumuh berdasarkan variable yang digunakan

Safitri (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan Citra Quickbird yang digunakan untuk penilaian parameter - parameter permukiman kumuh. Penelitian ini memanfaatkan Citra Quickbird dan sistem informasi geografis yang bertujuan untuk memperoleh parameter-parameter yang digunakan dalam mengidentifikasi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat, menganalisis faktor – faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan analisis SIG kuantitatif, dengan parameter permukiman kumuh antara lain Kesesuaian dengan tata ruang, kepadatan bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi bangunan, *building coverage*, kondisi drainase, kondisi persampahan, kondisi air bersih, kepadatan penduduk, potensi sosial ekonomi, letak strategis lokal, dan daya dukung masyarakat. Hasil dari penelitian ini berupa pembuktian

bahwa citra quickbird mampu menyadap parameter kekumuhan permukiman. Selain itu menghasilkan peta permukiman kumuh yang terdiri dari 5 tingkatan kelas permukiman antara lain non – permukiman, tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik permukiman kumuh. Namun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang tidak menggunakan pengharkatan serta hasil penelitian yang berupa karakteristik penduduk permukiman kumuh dan immobilitas penduduk permukiman kumuh.

Amin (2018) melakukan penelitian berjudul *Immobilitas Penduduk Terdampak Rob di Pesisir Semarang*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *mixed methode* dengan desain multi-fase dimana peneliti menggabungkan data kuantitatif untuk menyediakan analisis komprehesif permasalahan penelitian. Hasil penelitian adalah (1) terdapat 3 tipe penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana berdasarkan keinginan tinggalnya yaitu: Tipe 1, mereka yang ingin tetap tinggal; Tipe 2, mereka yang ragu antara tinggal atau pindah; dan Tipe 3, mereka yang tidak ingin tinggal. Masing-masing tipe memiliki perbedaan signifikan dalam hal daerah asal, umur, lama tinggal, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan; (2) Pemodelan menggunakan SEM PLS menunjukkan bahwa Model Keinginan tinggal yang dikembangkan memiliki determinasi yang kuat, ukuran pengaruh yang besar, dan tingkat generalisasi yang cukup besar sehingga model ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian empiris lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi keinginan tinggal di daerah rawan bencana; (3) Unit pengambilan keinginan tinggal adalah rumah tangga; (4) Keinginan tinggal diambil melalui 7 tahap yaitu: stimulus: ancaman bencana, valuasi lokasi, adaptasi, resiliensi, amenitas, pengambilan keputusan, dan review keputusan; (5) Proses pengambilan keinginan tinggal dipengaruhi oleh praktik sosial yang melibatkan tiga konsep yaitu Habitus, Modal, dan Arena. Arena berupa lingkungan fisik yang terdegradasi oleh kejadian bencana dipengaruhi oleh Habitus yang membentuk dan dibentuk oleh aktor melalui Modal sosial dan ekonomi yang dipertaruhkan di dalam arena tersebut; (6) Faktor Penahan (*Hold Factor*) merupakan konsep penting yang dapat menjelaskan mengapa orang tidak bermigrasi (*immobile*) dari daerah rawan

bencana. Faktor Pengikat dapat berupa: ikatan lokasi, ikatan keluarga, ikatan sosial, dan ikatan pekerjaan; (7) Persamaan Imobilitas Bencana merupakan kerangka teoritis untuk menjelaskan perilaku migrasi penduduk di daerah rawan bencana, dalam hal ini Imobilitas Bencana adalah akumulasi dari Valuasi daerah tempat tinggal dan Adaptasi terhadap bencana yang dikuatkan oleh Faktor Penahan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengetahui faktor penahan penduduk tidak melakukan mobilitas. Namun perbedaannya terletak pada penentuan kawasan yang digunakan untuk penelitian.

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat tabel perbandingannya dalam Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian Fajar Dhian Artha (2019)
Adi Prasetyo (2008)	Karakteristik Permukiman Kumuh di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta	1. Mengetahui karakteristik permukiman kumuh di kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta 5. Mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tumbuhnya permukiman kumuh di kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta	Survey dengan melakukan wawancara berdasarkan jumlah sample responden	Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap timbulnya permukiman kumuh di kampung krajan adalah pendidikan, mata pencaharian dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan faktor umur tidak berpengaruh terhadap timbulnya permukiman kumuh	Penentuan variabel yang digunakan berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda
Dywangga Auliannisa (2009)	Permukiman Kumuh di Kota Bandung	Memperoleh gambaran mengenai pola persebarang permukiman kumuh yang terdapat di Kota Bandung	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu intepretasi Quickbird dan survey lapangan dan dianalisis menggunakan analisis tetangga terdekat	Pola persebaran permukiman kumuh di Kota Bandung terbagi menjadi pola mengelompok (<i>Cluster pattern</i>), pola acak (<i>random pattern</i>), dan pola tersebar (<i>scatter pattern</i>) dengan pola persebaran yang mendominasi adalah pola acak (<i>random pattern</i>)	Mengkaji tentang pola persebaran permukiman kumuh dan menganalisis permukiman kumuh berdasarkan variabel yang digunakan

Lanjutan Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian Fajar Dhian Artha (2019)
Riezky Safitri (2017)	Analisis Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi	1. Mengidentifikasi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat, 2. Menganalisis fakto – faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat	Metode yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan analisis SIG kuantitatif, yaitu metode pengharkatan	Peta permukiman kumuh yang terdiri dari 5 kelas antara lain non – permukiman, tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat	metode penelitian yang tidak menggunakan pengharkatan serta hasil penelitian yang berupa karakteristik penduduk permukiman kumuh dan faktor – faktor immobilitas penduduk permukiman kumuh
Choirul Amin (2018)	Immobilitas Penduduk Terdampak Rob di Pesisir Semarang	1. Menjelaskan secara teoretis immobilitas penduduk di daerah terdampak rob di pesisir Semarang 2. Menguraikan pengambilan keinginan tinggal di daerah terdampak rob di pesisir semarang	<i>Mixed methode</i> dengan desain multi-fase. Peneliti menggabungkan data kuantitatif untuk menyediakan analisis komprehesif permasalahan penelitian	Terdapat 3 tipe penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana berdasarkan keinginan tinggalnya yaitu: Tipe 1, mereka yang ingin tetap tinggal; Tipe 2, mereka yang ragu – ragu antara tinggal atau pindah; dan Tipe 3, mereka yang tidak ingin tinggal	Menjelaskan perilaku migrasi penduduk di daerah rawan bencana.

Lanjutan Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Fajar Dhian Artha (2019)	Immobilitas Penduduk Permukiman Kumuh Kabupaten Purworejo	1. Menganalisis karakteristik penduduk permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo 2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi immobilitas penduduk permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo	Metode pendekatan berupa pendekatan rasionalistik dengan kuisioner dan bersifat deskriptif	1. Analisis karakteristik lingkungan permukiman kumuh berupa asal daerah, lama menetap, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan berdasarkan persepsi masyarakat di Kelurahan Kutoarjo. 2. Peta daerah asal dan lokasi bekerja penduduk permukiman kumuh Kelurahan Kutoarjo 3. Analisis faktor – faktor penyebab immobilitas penduduk permukiman kumuh Kelurahan Kutoarjo,

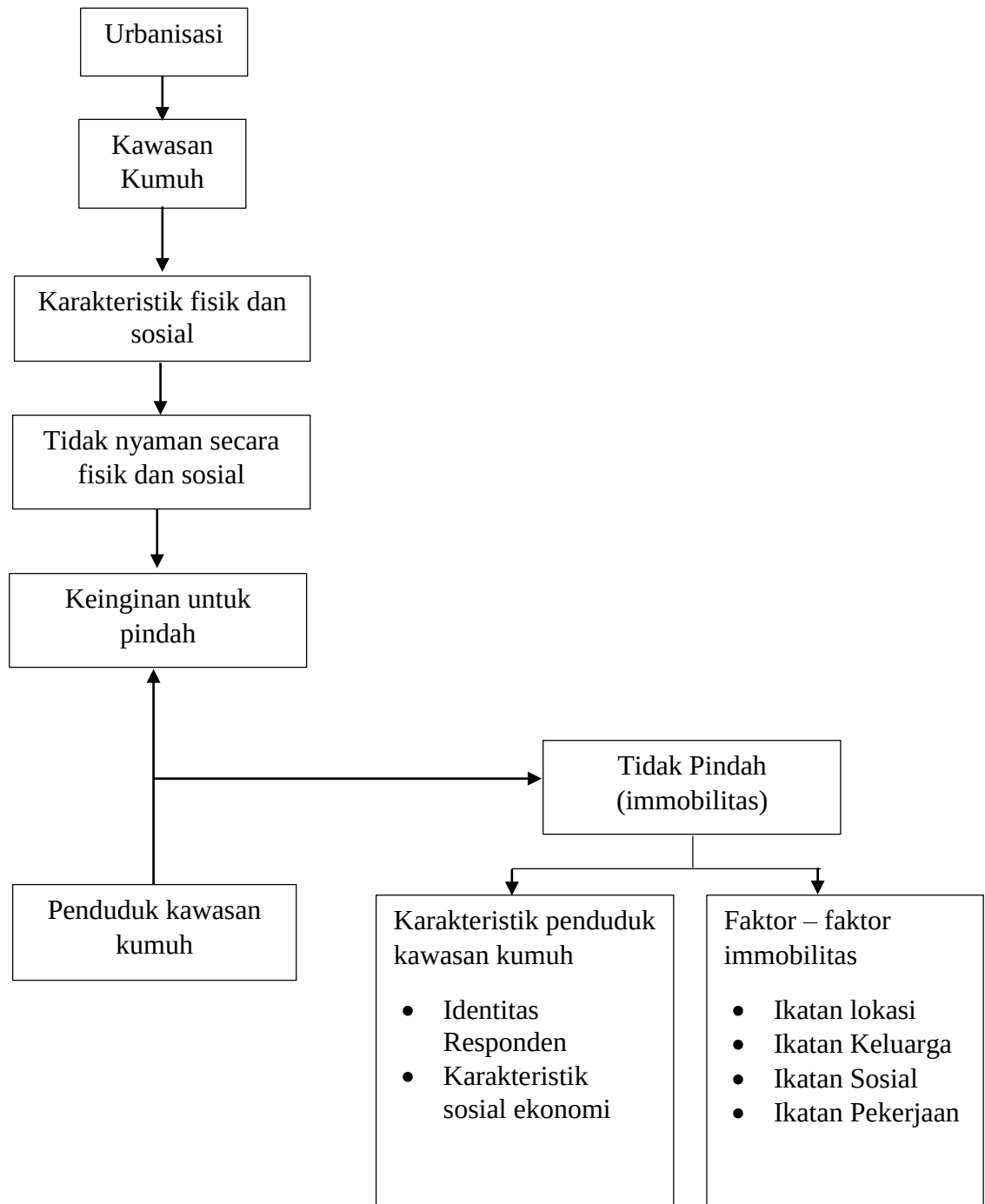
Sumber : Pengolahan, 2020

1.6 Kerangka Penelitian

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang berpindah kewilayah perkotaan, maka tentu saja hal ini akan menimbulkan berbagai dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak negatif urbanisasi antara lain munculnya kawasan kumuh.

Dilihat secara fisik, kondisi kawasan kumuh antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi yang rendah, jaringan jalan dengan lebar yang sempit dan tidak ada pengkerasan, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta persampahan yang belum terkelola dengan baik. Dilihat secara sosial ekonomi kondisi penduduk yang berada di kawasan kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan yang rendah, norma sosial yang longgar, sikap perilaku yang apatis antar penduduknya. Kondisi tersebut membuat kawasan tersebut tidak nyaman untuk ditinggali dan mengharuskan mereka untuk pindah dari lokasi tersebut.

Namun berdasarkan fakta dilapangan ada beberapa faktor penahan yang menyebabkan penduduk tidak pindah dari kawasan kumuh. Faktor penahan tersebut antara lain ikatan lokasi, ikatan keluarga, ikatan sosial, dan ikatan pekerjaan. Untuk mengetahui secara keseluruhan tentang kerangka pemikiran penelitian, dijelaskan dalam diagram kerangka pemikiran pada Gambar 1.4



Gambar 1. 4 Diagram Alir Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis

1.7 Batasan Operasional

Faktor penahan mobilitas penduduk dapat berupa ikatan lokasi, ikatan keluarga, ikatan sosial, dan ikatan pekerjaan (Amin, 2016).

Kampung kota adalah sebuah perumahan atau pemukiman yang seperti kampung di pedesaan, tapi berada di perkotaan (Setiawan, 2010).

Immobilitas penduduk adalah keadaan dimana penduduk tidak melakukan migrasi karena kesejahteraan penduduk yang lebih rendah sehingga penduduk tersebut nampaknya akan seterusnya terjebak di lokasi yang rentan terhadap perubahan lingkungan (Forsight, 2011)

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu - satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No.1 tahun 2011).

Pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No.1 tahun 2011).

1.8 Hipotesa Penelitian

H1 : Ikatan Lokasi berpengaruh positif terhadap Keinginan Tinggal penduduk kawasan kumuh Kelurahan Kutoarjo

H2 : Ikatan Sosial berpengaruh positif terhadap Keinginan Tinggal penduduk kawasan kumuh Kelurahan Kutoarjo

H3 : Ikatan Keluarga berpengaruh positif terhadap Keinginan Tinggal penduduk kawasan kumuh Kelurahan Kutoarjo

H4 : Ikatan Pekerjaan berpengaruh positif terhadap Keinginan Tinggal penduduk kawasan kumuh Kelurahan Kutoarjo

H5 : Ikatan Lokasi, Ikatan Sosial, Ikatan Keluarga, dan Ikatan Pekerjaan secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap Keinginan Tinggal penduduk kawasan kumuh Kelurahan Kutoarjo